

ISSN : 1978-0362

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
— ଭାବ —

Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

JURNAL

SOSIOLOGI REFLEKTIF

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Volume 7, Nomor 2, April 2013

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting : Muryanti,M.A

Sekretaris Penyunting : Napsiah,M.Si

Penyunting Pelaksana : Dadi Nurhaedi,M.si, Ahmad Zainal

Arifin, M.A, M.Si, Drs.Musa,M.Si, Sulistyaningsih,M.Si,

Ambar Sari Dewi,M.Si, Dr. Yayan Suryana,M.Ag

Sekretariat : Lusiana, MM, Listiyana,S.Sos

Desain Sampul & Tata Letak : Gramasurya

Diterbitkan oleh : Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi : Laboratorium Sosiologi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta

Telp (0274) 51957: Fax. (0274) 519571

Email: sosiologireflektif@uin-suka.ac.id dan

sosiologireflektif@gmail.com

Sosiologi Reflektif adalah jurnal yang dikelola oleh Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Media ini menekankan kajian seputar persoalan-persoalan sosial. Redaksi juga menerima tulisan seputar dinamika sosial baik yang bersifat teoritis, kritik, reflektif, opini, dan berbagai ide-ide dinamika sosial kemasyarakatan. Tulisan minimal 20 halaman kuarto, spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), catatan kaki, dan daftar pustaka. Penulis juga harus menyertakan nama lengkap bersama asal universitas atau lembaga profisional, alamat lengkap dan alamat email, nomor telepon, dan beberapa kalimat biografi penulis.

JURNAL

SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

<p>Transformasi Tarekat Konvensional di Indonesia: Bertasawuf Ala Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya <i>Achmad Zainal Arifin</i>.....</p> <p>Civil Religion: Antara Rousseau dan Bellah <i>Ahmad Norma Permata</i>.....</p> <p>Kiai dan Politik: Keterlibatan Kiai Madura dalam Politik Praktis <i>Muh. Syamsuddin</i></p> <p>Revitalisasi Tradisi, Pariwisata dan Skema Ekonomi-Politik Kota <i>Akhmad Ramdhon</i></p> <p>Dampak Pembangunan Desa Wisata terhadap Nelayan: Di Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat <i>Zessy Ardinal Barlan</i>.....</p> <p>Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan <i>Aryan Torrido</i>.....</p> <p>Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pasca Bencana <i>Sudaru Murti</i></p> <p>Peranan Perempuan dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga: Di Tempursari, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah <i>Nur Hidayah, Puji Lestari, V. Indah Sri Pinasti, Poerwanti Hadi Pratiwi</i>.....</p> <p>Model Kerjasama Lembaga Swasta, Pemerintah dan Pendidikan Tinggi <i>Derajad S.Widhyharto, Ambar Pertiwiningrum, Oki Rahadianto Sutopo</i>.....</p>	<p style="margin-right: 10px;">1</p> <p style="margin-right: 10px;">29</p> <p style="margin-right: 10px;">47</p> <p style="margin-right: 10px;">73</p> <p style="margin-right: 10px;">87</p> <p style="margin-right: 10px;">101</p> <p style="margin-right: 10px;">119</p> <p style="margin-right: 10px;">133</p> <p style="margin-right: 10px;">157</p>
---	--

Sinergisitas Masyarakat-Pemerintah-Swasta dalam Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan <i>Yudha P. Heston, Ahmad Yusuf Aljunaid</i>	181
Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Peradaban: Studi Pemikiran Ibn Khaldun <i>Syarifuddin Jurdì</i>	201
Gagasan Jürgen Habermas dalam Empat Puisi Mustofa Bisri <i>Mustari</i>	233
Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan <i>Andy Dermawan</i>	247
Ironi Strategi (Survive) Petani Garam di Desa Gersik Putih <i>Khalifi</i>	263
Agama dan Pariwisata <i>Adrian M. Puasa</i>	283

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, dengan segala puji dan rahmat Allah SWT., Jurnal Reflektif Volume 7, Nomor 2, April 2013 ini dapat terbit di hadapan pembaca yang budiman. Volume ini memiliki perbedaan yang signifikan daripada edisi yang sebelumnya. Niat kami yang teguh untuk menjadikan jurnal ini lebih berkualitas dengan menjadi “jurnal yang terakreditasi” memotivasi kami untuk melakukan perbaikan. Kami mohon dukungan dan doa restu dari pembaca budiman untuk menjadikan Jurnal Sosiologi Reflektif yang kita cintai ini menuju jurnal yang terakreditasi. Beberapa artikel yang dimuat dalam edisi ini mengkaji fenomena sosial yang komplek.

Ahmad Zainal Arifin menulis tentang Transformasi Tarekat Konvensional di Indonesia: Bertasawuf *ala* Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya. Pada masa sekarang banyak berkembang keberagamaan Islam. Termasuk pertumbuhan popularitas tasawuf di Indonesia yang dikembangkan dengan cara modern; workshop, pelatihan dan training. Hal ini menunjukkan meningkatnya komitmen umat Islam terhadap kesalehan lahiriah. Akan tetapi pada kenyataannya tumbuh gerakan Neo Salafi, notabene menentang pertumbuhan gerakan tasawuf tersebut. Dengan demikian muncul kategori keberagamaan; (1) Tasawuf Konvensional (Tarekat); (2) Tasawuf Non Tarekat dan (3) Neo Salafi. Zainal Arifin akan membahas tentang transformasi tarekat konvensional dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat modern sebagaimana yang ditulis oleh Habib Lutfi.

Ahmad Norma Permata menulis tentang Civil Religion; antara Rousseau dan Bellah. Dalam analisisnya disimpulkan bahwa konsep agama sipil yang ditawarkan oleh J. J. Rousseau dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Bellah merupakan terobosan baru untuk membangun mekanisme hubungan yang lebih baik antara agama dan politik. Upaya tersebut perlu dilakukan, dalam situasi kehidupan yang plural. Agama dan politik bukan hanya saling menjaga untuk menghadirkan kedamaian namun juga saling memprovokasi untuk menghasilkan kekacauan.

Muh. Syamsuddin mengkaji tentang Kiai dan Politik: Keterlibatan Kiai Madura dalam Politik Praktis. Paska lengsernya Suharto muncul elit-elit baru dan mulai naiknya para kiai dalam kancah politik di Madura. Adanya tokoh-tokoh politik yang berasal dari pesantren tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi. Kekuatan jaringan kiai pada aspek sosiokultural dan agama berasal dari santri, wali kiai sebagai penentu bangunan kharismatik kiai. Dalam kedudukannya tersebut kiai memiliki peran ganda, yakni sebagai elit agama dan elit politik. Akan tetapi keberadaan mereka pun tidak lepas dari kritik karena berpolitiknya kiai mengalami pergeseran dari nilai-nilai kultural menuju pada orientasi nilai ekonomi. Sehingga menurut penulis politik kiai perlu dikembalikan pada nilai-nilai keislaman.

Akhmad Ramdhon menulis Revitalisasi Tradisi, Pariwisata dan Skema Ekonomi, Politik Kota. Menurut penulis skema politik pariwisata diharapkan menjadi energi positif bagi proses lanjutan pengembangan kota secara makro. Sekaligus mampu menggerakkan juga sektor riil yang menjadi titik tolak gerakan ekonomi masyarakat secara luas.

Zessy Ardinal Barlan menulis artikel yang berjudul Desa Wisata dan Dampaknya terhadap Masyarakat Nelayan (di Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat). Menurut penulis pembangunan pariwisata saat ini digiatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Akan tetapi pada kenyataannya peningkatan pendapatan itu hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan justru menyingkirkan masyarakat yang seharusnya meningkat kesejahteraannya, yakni nelayan.

Aryan Torrido menulis Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan. Manusia merupakan sumber daya yang menjadi modal pembangunan. Tentunya jika manusia tersebut berkualitas. Akan tetapi menjadi beban jika tidak berkualitas. Oleh karena itu sumber daya manusia perlu terus dikembangkan. Terutama tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup serta etos kerjanya, yaitu etos kerja yang mencuat dari orientasi nilai-nilai budaya masyarakat.

Sudaru Murti menulis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pasca Bencana. Penulis menyimpulkan bahwa penguatan penanganan pasca bencana tanpa langkah profesional baik melalui sistem interaksi dan sistem tindakan sesuai dengan struktur yang ada, dapat dikatakan sebagai jejaring sosial. Ketangguhan dan ketegaran masing-masing kelompok dan individu, sebagai pijakan dalam memanage keragaman kepribadian di lokasi kebencanaan. Oleh karena itu penguatan

kelembagaan dalam kebersamaan kehidupan, berlandaskan pada nilai-nilai religi seperti cinta kasih, tawakal, sabar dan nilai-nilai luhur seperti; peduli, tanggap dan terampil sebagai modal dalam menyikapi setiap musibah kebencanaan sangat perlu dilestarikan.

Nur Hidayah, Puji Lestari, V. Indah Sri Pinasti dan Poerwanti Hadi Pratiwi menulis tentang Peranan Perempuan dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga. Kajian yang dilakukan penulis adalah sosiologi keluarga. Mereka menekankan bahwa keluarga adalah bagian dari sistem sosial yang paling kecil. Dengan demikian masing-masing anggota keluarga memiliki peranannya masing-masing yang mendukung keberadaan sistem tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan masih berperan dalam kerja-kerja domestik, sedangkan laki-laki masih mendominasi untuk bekerja di sektor publik. Walaupun demikian, peranan perempuan dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi tidaklah bisa dipandang sebelah mata.

Derajad S.Widhyharto, Ambar Pertiwiningrum dan Oki Rahadianto Sutopo menulis artikel Model Kerjasama Lembaga Swasta, Pemerintah dan Pendidikan Tinggi. Penulis menekankan bahwa lembaga dalam berbagai bentuk; organisasi internasional, perusahaan maupun pemerintah pusat tidak berdiri sendiri. Lembaga tersebut menganggap kerjasama sebagai "arena" yang terlekat dengan struktur serta konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian pengembangan SOP (*standar operating procedur*) perlu dipertimbangkan sesuai dengan konteks serta kekhususan masing-masing lembaga.

Yudha P. Heston dan Ahmad Yusuf Aljunaid menulis artikel Peningkatan Peran, Kapasitas dan Sinergi Masyarakat-Pemerintah-Swasta dalam Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan. Artikel ini menekankan bahwa keberhasilan program penataan kawasan kumuh perkotaan sangat tergantung pada kemampuan masyarakat dalam partisipasi pembangunan infrastruktur. Hal terpenting proses pelibatan masyarakat secara penuh dalam proses pembangunan melalui pembentukan kelompok usaha dan sejenisnya.

Artikel yang ditulis oleh Syarifuddin Jurdi berjudul mengkaji Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Peradaban: Studi atas Pemikiran Ibn Khaldun. Ilmu pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari cara berpikir (metode ilmiah). Dengan menggunakan metode ilmiah merupakan langkah awal untuk melakukan kajian ilmiah. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun adalah sosok ilmuwan pioner dalam

berpikir ilmiah. Ibnu Khaldun melakukan kritik terhadap cara berpikir ilmuwan terdahulu.

Mustari menulis Gagasan Jürgen Habermas dalam Empat Puisi Mustofa Bisri. Dalam analisisnya penulis menegaskan bahwa dalam menyampaikan gagasan kritisnya kedua penulis memiliki perbedaan. Terkait dengan paradigma kritis, Habermas mengatakan bahwa manusia diobjektifikasi dengan menggunakan bahasa, sedangkan Bisri menyimpulkan bahwa penguasa sangat "menguasai" rakyatnya, sedangkan rakyat tidak berkuasa atas apa pun, hanya membebek saja.

Andy Dermawan menulis Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan Perspektif Sosiologi. Penulis menjelaskan tugas teori adalah menciptakan sejarah babak baru manusia yang terbebas dari dominasi apapun. Teori kritis dan sosiologi pengetahuan, bukan sekadar berurusan dengan benar atau salah tentang fakta atau suatu realitas sosial yang terjadi, tetapi bertugas memberikan proses penyadaran atau perspektif tentang bagaimana kepercayaan masyarakat membentuk realitas sosial. Dengan kata kunci implementasi teori kritis dan sosiologi pengetahuan adalah kesadaran.

Demikian gambaran secara umum jurnal yang akan sidang pembaca nikmati edisi ini. Semoga apa yang tertuang dalam kajian ini memberikan sumbangan yang berarti bagi pengetahuan. Selamat membaca. *Wallahu a'lam bi shawab*

Wassalamualaikum wr. wb

Redaksi

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
— ४४ —

CIVIL RELIGION: Antara Rousseau dan Bellah

Ahmad Norma Permata

Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga
Alamat Email: an.permata@uin-suka.ac.id

Abstract

This article explores the notion of Civil Region in the thoughts of French renaissance philosopher J.J. Rousseau and American sociologist Robert N. Bellah. For Rousseau, who coined the term, it refers to the spiritual dimension of social contract, in which the state is capable of rewarding those who comply with its norms and regulations, as well as punishing those who disregard them. He contrasted it with the Religion of Man which is personal religions of the people, Religion of Community or religion as a communal identity and Religion of the Priest or spiritual traditions that undermine worldly lives. Whereas for Bellah, Civil Religion denotes a public conscience that amalgam divine spirituality with public goods and the dynamics of power politics. He suggests that it is a religious tradition in the making, and the latest development of religious evolution, following the history of Primitive Religion that worship natural powers, Archaic Religions that venerated God-Kings, Historic Religions that is current world religions characterized by the existence transcendental Deity, special class of religious specialists, and valuation of spiritual realms over worldly lives, as well as Protestantism which perceive worldly lives as equal with spiritual ones.

Key Words: Civil Religion, Rousseau, Bellah and Religion of Community

Intisari

Artikel ini membahas gagasan mengenai Agama Sipil oleh filsuf Perancis J.J. Rousseau dan Robet N. Bellah, seorang Sosiolog Amerika. Menurut Rousseau yang menciptakan istilah itu, analisisnya mengacu pada dimensi spiritual kontrak sosial, di mana negara mampu menghadiahi mereka yang mematuhi norma-norma dan peraturan, serta menghukum mereka yang mengabaikannya. Dia membandingkannya dengan agama manusia yang merupakan agama pribadi orang-orang. Agama masyarakat atau agama sebagai identitas komunal dan agama imam atau tradisi spiritual yang meruntuhkan kehidupan duniawi. Sedangkan menurut Bellah, agama sipil menunjukkan spiritualitas ilahi hati nurani publik bercampur dengan barang publik dan dinamika politik kekuasaan. Dia menunjukkan tradisi keagamaan dalam penciptaan dan pengembangan terbaru dari evolusi agama. Tradisi tersebut mengikuti sejarah agama primitif yang menyembah kekuatan alam, agama archaic yang memuja Tuhan, agama bersejarah yaitu agama-agama dunia saat ini yang ditandai dengan keberadaan Dewa Transendental, kelas khusus spesialis agama dan penilaian alam spiritual atas kehidupan duniawi, serta Protestan yang memahami kehidupan duniawi yang setara dengan yang spiritual.

Kata Kunci : Agama Sipil, Rousseau, Bellah dan Identitas Komunal

Pendahuluan

Agama dan politik merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan manusia dan persoalan hubungan antara keduanya juga telah menjadi bahan pemikiran para ilmuwan, filsuf maupun teolog sepanjang sejarah. Hubungan antara agama dan politik selalu menarik untuk dikaji, karena keduanya sama-sama memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Politik selalu mempengaruhi agama, sekurang maupun sebanyak agama mempengaruhi politik. Usaha untuk memahami keduanya secara terpisah, cenderung untuk mengaburkan persoalan, dan bukan memperjelasnya.¹

¹ Max L. Stackhouse, "Politic and Religion," dalam *Encyclopedia of Religion*, Mircea Eliade (ed.), New York: University of Chicago Press, 1996

Betapa peliknya hubungan antara agama dan politik, terlebih dalam konteks modern, diuraikan dengan jelas oleh J. Philip Wogeman. Secara garis besar tedapat tiga pola umum hubungan politik dan agama: *Pertama*, pola teokrasi di mana agama menguasai negara; *kedua*, *erastianisme* bila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu negara mengkooptasi agama; dan *ketiga* hubungan sejajar antara agama dan Negara dalam pemisahan yang *unfriendly* dan *friendly*.² Lebih jauh Wogeman mencatat bahwa ketiga pola tersebut masing-masing memiliki persoalan yang harus diwaspadai. Pola teokrasi akan menjebak pada situasi di mana akan sulit diketahui apakah seorang politikus benar-benar memperjuangkan politik untuk agamanya, atau sebaliknya sekedar menggunakan agama untuk kepentingan politik pribadi atau kelompoknya. Siapa yang bisa menentukan dengan pasti kebenaran agama sebagaimana yang dikehendaki Tuhan? *Erastianisme* juga akan menggiring kepada pemberhalaan negara, di mana kepentingan politik menjadi tujuan agama. Sedangkan pemisahan yang *unfriendly* antara agama dan negara merupakan hal yang mustahil karena kehidupan keagamaan selalu memiliki dimensi sosial dan dengan demikian bersentuhan dengan aspek hukum yang menjadi wewenang negara. Lalu siapa yang harus menjadi penilai? Wogeman menganggap alternatif terbaik adalah pemisahan yang *friendly* meskipun tetap menyimpan persoalan.³

Rumusan teoritis untuk menempatkan hubungan antara agama dan negara secara sejajar inilah yang kemudian dikenal dengan wacana tentang agama sipil *Civil Religion*. Dalam rumusan yang lebih pasti, John A. Coleman mendefinisikan agama sipil sebagai:

*...a special case of the religious symbol system, designed to perform a differentiated function which is unique province of neither church nor state. It is a set of symbolic forms and acts which man as citizen and his society in world history to the ultimate condition of his existence.*⁴

Sedangkan fungsi agama sipil ini, simpul Wogeman, adalah sebagai perekat solidaritas sosial maupun politik dari masyarakat fungsi agama seperti yang dijelaskan oleh Durkheim. Sebab agama maupun politik, dalam diri mereka masing-masing maupun dalam

2 Lihat J. Paul Wogeman, *Christian Perspective on Politics*, Westminister: John Knox Press, 2000, hlm. 250-252.

3 *Ibid*, hlm. 253-259.

4 John A. Coleman, "Civil Religion," dalam *Sociological Analysis*, 31 (Summer, 1970) hlm. 69.

hubungan antara keduanya menyimpan potensi ganda, sebagai perekat maupun sebagai pembelah. Sehingga agama sipil diharapkan menjadi penyeimbang untuk mempertemukan keduanya.⁵

Artikel ini akan membahas tentang konsep agama sipil dalam pemikiran Jean Jacques Rousseau dan Robert N. Bellah, dua pemikir yang secara serius mencurahkan perhatian mengenai persoalan ini. Ada posisi yang kontras antara keduanya, di mana Rousseau adalah seorang filsuf yang hidup di era Pencerahan Perancis yang melahirkan gerakan liberalisme anti-klerikal; sementara Bellah adalah sosiolog yang menyaksikan tumbuh berkembangnya Amerika sebagai contoh negara paling demokratis. Persoalan yang akan dibahas dalam makalah ini mencakup: [a] poin pokok yang menjadi sentral pemikiran mereka; [b] pandangan mereka tentang agama dan politik; [c] rumusan mereka tentang civil religion; dan [d] kritik dan kesimpulan.

Jean Jacques Rousseau: *From Civil Society To Civil Religion*

Rousseau lahir di Jenewa 1712 dan meninggal di Paris 1778, adalah filsuf yang dikenal karena teorinya tentang *Contract du Social*, meskipun sebenarnya ia juga menulis tentang berbagai persoalan mulai dari pendidikan, sains, seni, hingga agama. Dalam sejarah hidupnya, ia dibaptis dalam Gereja Protestan Calvinis, namun sempat konversi ke Katolik, dan akhirnya kembali lagi ke Protestan. Ia bergaul dengan pemikir besar Perancis lain seperti Voltaire dan D'Alambert, ia pernah ke Italia dan juga ke Inggris bertemu dengan David Hume. Di antara ungkapan yang paling populer dan sering dikutip adalah pembukaan buku *Kontrak Sosial*-nya: *l'homme est né libre, et partout il est dans les fers* Man is born free, and everywhere he is in chain.⁶

Karya-karya awal Rousseau, antara lain *Discourse on the Arts and Science* (1750) dan *Discourse on the Origin and Foundation of Inequality among Men* (1758) menunjukkan bahwa ia berpandangan negatif mengenai masyarakat dan peradaban. Menurutnya, sebelum ada peradaban manusia memiliki kebebasan penuh terhadap dirinya sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lain ia juga belum mengenal dorongan untuk menguasai orang lain, dan tidak mengenal rasa takut untuk dikuasai. Sedangkan setelah lahirnya peradaban, manusia menjadi kehilangan

5 Ibid, hlm. 76.

6 Biografi singkat tentang Rousseau, terutama dalam hubungannya dengan pemikirannya mengenai agama, lihat William Leon McBride, "Rousseau, Jean Jacques," dalam *Encyclopedia of Religion*, vol. 12, hlm. 477-479.

kebebasannya dan senantiasa dihantui oleh dorongan untuk menguasai orang lain dan ketakutan untuk dikuasai. Rousseau juga menganggap sains dan seni bukan sebagai hal yang meningkatkan hidup manusia, melainkan malah memerosotkannya.⁷

Namun dalam perkembangan selanjutnya Rousseau mengalami perubahan pemikiran yang cukup drastis, di mana ia mulai menilai secara positif kehidupan yang dibangun dalam sebuah peradaban dan bahkan menganggapnya sebagai alternatif terbaik kehidupan kolektif bagi manusia. Puncaknya adalah ketika ia menulis buku *Social Contract*, yang membahas tentang hubungan problematis antara individu dan masyarakat. Dalam hal ini, sebenarnya Rousseau merupakan pewaris dari dua pemikir sebelumnya yang menggeluti persoalan tersebut, yaitu Thomas Hobbes dan John Lock.⁸

Masyarakat Alami dan Masyarakat Sipil

Dalam *Book I* dari *Social Contract*,⁹ Rousseau menjelaskan tentang perbedaan antara masyarakat alami dan masyarakat sipil. Masyarakat alami adalah masyarakat yang diatur dengan hukum kekuatan, di mana yang kuat menguasai yang lemah. Rousseau menganggap kondisi ini sebagai kondisi yang salah secara moral, karena kemampuan fisik tidak ada hubungannya dengan hak secara rasional maupun moral. Ia mengatakan:

*The strongest is never strong enough to be always the master, unless he transform strength into right, and obedience into duty. Hence the right of the strongest, which, though to all seeming ironically, is really lain down as a fundamental principle. But are we never to have an explanation of this phrase? Force is a physical power, and I fail to see what moral effect it can have... Let us then admit that force does not create right, and that we are obliged to obey only legitimate powers.*¹⁰

Sebagai alternatif bagi hubungan sosial yang didasarkan pada kekuatan Rousseau mengusulkan sebuah hubungan yang didasarkan kepada kesepakatan kontraktual, yang disebutnya *social contract*. Tujuan

⁷ Penjelasan lebih detail tentang karya-karya dan perkembangan pemikirannya, lihat Frederick Copleston S.J., *A History of Philosophy*, London: Search Press, 1960, vo. VI, hlm. 59-79.

⁸ *Ibid*, hlm. 80 dst.

⁹ Jean Jacques Rousseau, *Social Contract*, Trans. G.D.H. Cole, London: Dent, 1955.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3.

dari kontrak sosial itu sendiri adalah:

To find a form of association which will defend and protect with the whole common force the person and goods of each associate, and in which each, while uniting himself with all, may still obey himself alone, and remain as free as before... Each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will, and, in our corporate capacity, we receive each member as an indivisible part.¹¹

Tentu saja, dalam melakukan kontrak sosial, seseorang akan kehilangan sebagian kebebasannya. Namun Rousseau menjamin bahwa, karena ia memberikannya kepada keseluruhan masyarakat yang anonim dan abstrak, maka sebenarnya ia tidak menyerahkan kebebasan itu kepada siapa pun kecuali dirinya sendiri. Atau, tambah Rousseau dengan melakukan kontrak sosial, seseorang akan kehilangan kebebasan alamiahnya yaitu bebas yang ditopang oleh kekuatan individual namun ia memperoleh kebebasan sipil yaitu kebebasan yang dijamin oleh *general will*.

Dalam pemahaman Rousseau *general will* merepresentasikan tujuan tertinggi dari kontrak sosial, yaitu tujuan untuk kebaikan semua anggota sekaligus keseluruhannya. Bahkan Rousseau menganggap *general will* adalah sesuatu yang mutlak benar *infallible* karena ia merupakan hakikat dari kehidupan kolektif itu sendiri. Namun perlu dicatat bahwa Rousseau membedakan antara *general will* dan *will of all*, karena,

There is often a great deal of difference between the will of all and the general will; the latter considers only the common interest, while the former takes private interest into account, and is no more than a sum of particular wills.¹²

General will inilah yang menurut Rousseau harus diwujudkan oleh keberadaan sebuah negara dan karena itu negara memiliki kekuasaan mutlak atas warga negaranya.

Dengan demikian, *social contract*, atau kontrak sosial merupakan perkembangan selanjutnya dari peradaban manusia yang alami. Karena dalam kontrak sosial ini ketidak-setaraan fisikal yang dimiliki oleh manusia yang memang alami digantikan oleh kesetaraan dan persamaan yang ditopang oleh hak-hak moral dan rasional.

11 *Ibid*, hlm. 7.

12 *Ibid*, hlm. 16.

Agama Sipil: Dimensi Religius dari Kontrak Sosial

Sebagai konsekuensi dari perubahan tatanan dari masyarakat alami menuju masyarakat sipil, Rousseau juga memandang perlunya penyesuaian dalam struktur keberagamaan masyarakat. Karena bentuk keberagamaan manusia akan selalu mengikuti pola dasar masyarakat yang ada. Pada masa masyarakat primitif, manusia menganggap yang menjadi raja adalah para dewa dan bentuk pemerintahannya adalah teokrasi. Namun ketika muncul kerajaan yang berbeda-beda, Rousseau menyebutnya nasionalisme, maka ketuhananannya pun terbagi-bagi menjadi polities, setiap bangsa memiliki dewa sendiri-sendiri. Inilah awal mula munculnya intoleransi teologis dan sosial.¹³

Namun pertentangan yang terjadi menurut Rousseau belum ada permusuhan antara agama dan negara, karena agama dan negara masih menyatu. Belum ada perang antar agama, karena masing-masing bangsa memiliki dewa mereka sendiri yang tidak berhak kepada kepada manusia dari bangsa lain.

Pertentangan antara agama dan negara, kata Rousseau, baru muncul ketika agama Kristen mulai mengembangkan konsep tentang dunia lain akhirat yang berbeda dan terpisah dari dunia ini. Dengan demikian, ada dua pusat kekuasaan, yaitu raja dan pendeta, yang mengkalim memiliki kekuasaan terhadap rakyat. Demikian juga dalam kasus Islam, meskipun pada zaman Muhammad masyarakat masih bersatu dalam payung tunggal agama-negara, namun pada perkembangan berikutnya muncul pemisahan yang tajam antara pemimpin agama dan pemimpin negara. Pertentangan keduanya, begitu dimulai, tidak mungkin dihentikan lagi. Fenomena di Eropa, di masa Rousseau, juga memperlihatkan kenyataan yang sama, meskipun para raja Inggris dan Czar Rusia mengkalim dirinya sebagai kepala negara sekaligus pemimpin gereja.¹⁴

Namun karena agama, dalam pandangan Rousseau, selalu menjadi dasar bagi terbentuknya sebuah Negara artinya, tidak mungkin membangun negara dengan menghapuskan agama maka perlu dicari format keberagamaan yang tidak bertentangan dengan keberadaan Negara sebagai perwujudan dari kontrak sosial.¹⁵

13 *Ibid*, hlm. 79.

14 *Ibid*, hlm. 80.

15 *Ibid*.

Sejauh itu Rousseau mencatat tiga bentuk keberagamaan dalam hubungannya dengan masyarakat yang masing-masing memiliki kelebihan, namun lebih banyak memuat kelemahan. *Pertama*, adalah apa yang ia namakan *religion of man* yaitu agama pribadi yang hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan agama Kristen Bibel termasuk dalam kelompok ini. Jenis keberagamaan seperti ini tidak berguna bagi pembangunan masyarakat sipil karena ia tidak peduli dengan urusan dunia. *Kedua*, *religion of the citizen*, yaitu agama masyarakat kono yang hanya terbatas kepada bangsa atau negaranya sendiri. Agama jenis ini memiliki kelemahan karena selalu menganggap orang-orang di luar wilayahnya, yang tidak terkena cakupan aturan agamanya, sebagai orang kafir yang sesat. *Ketiga*, adalah *religion of the priest*, yaitu yang memisahkan antara kekuasaan negara dan kekuasaan agama, karena itu menciptakan keterbelahan sosial dan tidak berguna bagi pembangunan masyarakat sipil seperti agama Lama di Tibet, agama Jepang, dan Katolik Roma.¹⁶

Sebagai alternatif dari ketiga bentuk tersebut, Rousseau mengusulkan sebuah bentuk keberagamaan yang murni sipil, yaitu agama yang akan membuat setiap rakyat memiliki landasan moral untuk mengabdi dan mencintai masyarakat dan negaranya. Yaitu,

*A purely civil profession of faith of which the Sovereign should fix the articles, not exactly as religious dogmas, but as social sentiments without which a man cannot be a good citizen or a faithful subject.*¹⁷

Inilah yang ia maksud dengan agama sipil, yaitu suatu bentuk kesetiaan kepada masyarakat atau negara dengan nuansa religius. Agama ini, meskipun tidak mengharuskan dan juga tidak bisa memaksa orang untuk mempercayainya, namun ia punya hak untuk menghukum orang yang tidak mengikutinya bukan sebagai orang yang tidak saleh, tetapi sebagai orang yang anti-sosial karena dalam agama ini yang religius adalah yang sosial.

Agama sipil versi Rousseau ini juga memiliki basis spekulatif metafisik berupa dogma, meskipun tidak sama dengan dogma agama-agama konvensional. Rumusan dogma agama sipil, menurut Rousseau,

The dogmas of civil religion ought to be view, simple, and exactly worded, without explanation or commentary. The existence of a mighty, intelligence and beneficent Divinity, possessed of foresight and

16 *Ibid*, hlm. 81.

17 *Ibid*, hlm. 83.

*providence, the life to come, the happiness of the just, the punishment of the wicked, the sanctity of the social contract and the laws.*¹⁸

Robert N. Bellah: *Through Civil Religion to Democracy*

Robert N. Bellah adalah sosiolog Amerika terkemuka yang lahir di Southwest Oklahoma, 1927, ayahnya seorang editor sebuah koran lokal. Ia menempuh pendidikan di Harvard University, lulus *graduate* dengan predikat *summa cum laude*, dengan penelitian tentang sistem kekerabatan suku Indian. Melanjutkan pendidikan di tempat yang sama, dan merampungkan disertasi tentang agama Tokugawa, yang mendapat gelar Ph. D. dari dua departemen sekaligus Dept. Ilmu Sosial dan Dept. Bahasa Timur. Di Harvard inilah ia berguru kepada Talcott Parsons, sosiolog besar abad ke-20, yang juga sangat mempengaruhi perkembangan pemikirannya di kemudian hari. Ia pernah mengajar di McGill Institute of Islamic Studies, Kanada dan selanjutnya menghabiskan sisa kariernya di University of California di Berkeley.¹⁹

Pemikiran Bellah mengalami dua tahapan perkembangan. *Pertama* adalah tahap ketika ia sangat dipengaruhi oleh interpretasi Parsonian terhadap tesis Weber. Menurut Bellah, Parsons telah berhasil di satu sisi mengubah wajah Weber yang murung dan pesimis menjadi Weber yang berwajah cerah dan penuh optimisme dan di sisi lain menundukkan fungsionalisme Durkheim yang menggebu kepada strukturalisme yang lebih hermeneutis. Sedangkan tahap *kedua* adalah ketika ia mencoba untuk melepaskan diri dari apa yang disebutnya "*Parsonian Vocabulary*," dan mulai mengembangkan teori sosiologi yang inkonvensional.²⁰ Sebagaimana terlihat dalam artikelnya tentang "*Sociology of Religion*" ia melampaui tradisi sosiologi yang reduksionis dalam melihat agama sekedar sebagai aspek atau fungsi dari masyarakat serta mengadopsi pendekatan yang *sui generis* dari para fenomenolog seperti Rudolph Otto, Gerardus van der Leeuw maupun Mircea Eliad.²¹ Pendekatan sosiologis seperti Bellah ini kemudian juga dilakukan Parsons di akhir masa hidupnya.²²

18 *Ibid*, 84.

19 Otobiografi Bellah dapat dibaca dalam *Beyond Belief, Essays on Religion in a Post-Traditional Society*, New York: Harper & Row, 1970, hlm. xi-xxi.

20 Lihat "Pengantar" dalam Robert N. Bellah, *Religi Tokugawa*, terj. Wardah Hafiz, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. xi dst.

21 Bellah, "The Sociology of Religion," dalam *Beyond Belief*, hlm. 6.

22 Lihat entri tentang "Parsons, Talcot," dalam *Encyclopedia of Religion*, (ed.)

Kedua tahapan di atas, tema agama menempati posisi sentral dalam pemikiran Bellah. Lebih khusus lagi, tema yang menarik perhatiannya adalah persoalan modernisasi dan tantangannya terhadap tradisi agama-agama. Ia pernah menulis tentang respon hampir semua agama besar dunia, dalam hubungan dengan persoalan perubahan sosial yang dihadirkan oleh modernisasi. Ia bahkan berani menyatakan bahwa modernisasi, di samping berbagai hal yang terkait, terutama merupakan persoalan moral dan religious yaitu pada perdebatan tentang *free will* dan *predestination*.²³ Pada awalnya, terbuai dalam spirit Parsonian, Bellah menganggap modernisasi sepenuhnya positif bagi agama-agama; namun kemudian ia menyadari bahwa modernisasi juga menyebabkan pengikisan tradisi dan menimbulkan disorientasi di kalangan pemeluknya. Salah satu wujud benturan agama dan modernisasi adalah konsep tentang agama sipil.²⁴

Evolusi Menuju Agama Post-Tradisional

Tulisan Bellah mengenai Evolusi Agama²⁵ meski masih bernuansa Parsonian perlu mendapat perhatian dalam usaha memahami teorinya tentang agama sipil. Di satu sisi, tulisan ini merepresntasikan konsep dasarnya tentang agama dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat dan di sisi lain ia sekaligus meng-up date perdebatan tentang sejarah agama-agama. Dalam Studi Agama ada tiga pandangan utama mengenai sejarah agama-agama: *Pertama* perspektif evolusionis dari para sosiolog dan antropolog yang menganggap agama berkembang dari bentuk sederhana yang tidak sempurna menuju yang lebih kompleks dan lebih sempurna dari animisme atau totemisme, menjadi politeisme dan berpuncak pada monoteisme;²⁶ *kedua* anti-evolusionis atau non-developmentalis dari para teolog yang menganggap agama-agama sudah sempurna sejak awalnya bahwa monoteisme adalah bentuk awal dari agama yang kemudian menyimpang menjadi animis atau

Mircea Eliade, New York: University of Chicago Press, 1996.

23 Bellah, "Meaning and Modernization," dalam *Beyond Belief*, hlm. 64-66.

24 Bellah mengakui kritik yang diarahkan kepadanya ini, terutama yang dilakukan oleh Maruyama Masao berkenaan dengan tulisannya tentang agama Tokugawa. Lihat Bellah, *Religi Tokugawa*, hlm. xiv.

25 Dalam *Beyond Belief*, hlm. 20-52.

26 Lihat misalnya James Waller dan Mary Edwardson, "Evolutionis," dalam *Encyclopedia of Religion*, (ed.) Mircea Eliade, New York: University of Chicago Press, 1996; Eric J. Sharpe, *Comparative Religion, A History*, London: Duckworth, 1977, Chapter 3, "Darwinism Makes It Possible," hlm. 47-71.

politeis²⁷ dan ketiga pandangan regressionis dari para spiritualis yang menganggap sejarah agama adalah sejarah kemerosotan spiritual dari masyarakat primitif yang penuh sakralitas kepada masyarakat modern yang profan.²⁸

Meskipun berangkat dari tradisi sosiologis, dan menggunakan istilah evolusionis, Bellah berhasil memadukan sekaligus mengatasi perdebatan segi tiga di atas.²⁹ Pertama, ia mengikuti para evolusionis dengan menempatkan sejarah agama berkembang dari bentuk-bentuk sederhana menuju bentuk yang kompleks. Namun ia membatasi bahwa yang berkembang hanyalah bentuk-bentuk simbolik, organisatoris, dan sosialnya, dan bukan kualitas atau nilai religiusitasnya. Dengan demikian, kedua, ia sepakat dengan para anti-evolusionis bahwa tidak ada perkembangan religiusitas agama sudah sempurna sejak awal. Ketiga, ia juga sejalan dengan para regressionis bahwa sejarah agama merepresentasikan sebuah kemerosotan yaitu memudarnya orientasi dogmatis kepada transendensi yang metafisik menuju kepada moralisme yang rasional.

Dalam formulasi Bellah, terdapat lima tahapan dalam sejarah perkembangan agama. [1] Tahap Primitif, dicontohkan oleh masyarakat asli Australia yang dicirikan belum adanya dewa atau Tuhan yang disembah dan belum ada kelas pendeta;³⁰ [2] tahap Arkais, dari agama Afrika, Oceania, dan Timur Tengah Kuno yaitu mulai munculnya dewa-dewa yang menjadi sesembahan serta kependetaan yang memiliki tugas dan hak istimewa dalam agama, serta konsep *divine king*;³¹ [3] tahap Historis, agama-agama besar dunia yang ada sekarang ini yang dimana mulai terbentuk konsep Monoteisme, akhirat, surga dan neraka, dosa dan pahala, serta tendensi untuk merendahkan atau bahkan menolak kehidupan dunia demi keselamatan nanti di akhirat, dan juga merebaknya pertentangan antara pendeta dan raja, antara negara dan gereja;³² [4] tahap Modern Awal, yang bentuk sempurnanya terdapat

27 Lihat Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane*, New York: Harcourt, 1957; *Pattern in Comparative Religion*, New York: Meridian Books, 1958, hlm. 548 dst.

28 Lihat Walter H. Capps, *Religious Studies, the Making of A Discipline*, Minneapolis: Fortres Publishing, 1996, terutama bagian yang membahas tentang W. Schmidt dan R. Pettazzoni, hlm. 87-94.

29 Tampaknya konsep evolusi Bellah ini juga mengadopsi dari Parsons, lihat Ankie M. M. Hoogvelt, *The Sociology of Developing Societies*, London: Macmillan, 1976, hlm. 15 dst, yang membahas tentang teori evolusi kebudayaan dari Talcot Parsons.

30 Bellah, "Religious Evolution," dalam *Beyond Belief*, hlm. 25 dst.

31 *Ibid*, hlm. 29 dst.

32 *Ibid*, hlm. 32 dst.

dalam Kristen Protestan, dengan ciri utama berupa dihapuskannya kelas pendeta dan penerimaan kembali kehidupan dunia,³³ dan [5] tahap Modern, yang lebih berorientasi kepada moral dan hati nurani, serta meninggalkan dogmatisme transendensi metafisik, baik Tuhan maupun akhirat.³⁴

Agama Sipil-*Religion of the Hearth*

Di antara aspek yang belum terartikulasikan secara mapan pada tahap modern sebagai tahap terkini dalam skema evolusi Bellah adalah hubungan antara agama dan negara. Hal itu terjadi, menurut Bellah, karena:

*There another possibility that emerges in the early modern and modern phases. This is the possibility that a distinct set of religious symbols and practices may arise that address issues of political legitimacy and political ethics but that are not fused with either church or state.*³⁵

Bellah menyebut secara tentatif persoalan ini, mengikuti Rousseau, dengan istilah *civil religion*.

Persoalan tersebut, dalam hemat Bellah, perlu mendapat rumusan teoritis yang memadai agar dapat dicarikan format yang lebih baik dalam menata hubungan antara agama dan negara. Sebab kedua pihak semenjak munculnya agama historis selalu terlibat persoalan legitimasi. Seperti yang pernah dikatakan Rousseau, Bellah membenarkan bahwa,

*In no society can religion and politics ignore each other. Faith and Power must always, however, uneasily, take a stance toward one another. The polity, more than most realms of human action, deals obviously with ultimate things. With respect to both internal deviants and external enemies, political authority has claimed the right to make life-and-death decisions. Religion, on the other hand, claim to derive from an authority that transcends all earthly powers.*³⁶

Sebuah contoh yang menurut Bellah dapat dijadikan contoh acuan untuk mendiskusikan agama sipil terdapat dalam sejarah bangsa Amerik.³⁷ Momen awal yang dijadikan pijakan Bellah, adalah pidato

33 *Ibid*, hlm. 36 dst.

34 *Ibid*, hlm. 39 dst.

35 Robert N. Bellah dan Philip Hammond, *Varieties of Civil Religion*, hlm. xi.

36 *Ibid*, hlm. viii.

37 Bellah, "Civil Religion in America", dalam *Beyond Belief*, hlm. 168-192.

Kennedy yang sempat beberapa kali menyebut tentang kata "Tuhan" namun tidak tampak merujuk secara spesifik kepada bahasa agama tertentu. Sehingga Bellah menganalisis bahwa istilah "Tuhan" yang digunakan Kennedy memiliki dua tafsiran: *pertama* ia merupakan istilah generik yang terdapat dalam semua agama; dan *kedua* referensi utamanya bukan kepada objek "Tuhan", melainkan kepada subjek yaitu "bangsa Amerika" yang sama-sama bertuhan.

Kemudian Bellah juga menunjukkan bahwa sepanjang sejarah bangsa Amerika ternyata dipenuhi oleh situasi di mana idealisme religius *berkelindan* dengan semangat nasionalisme. Semenjak masa awal kedatangannya, para imigran dari berbagai negara Eropa menganggap Amerika sebagai *the promised land*, sebagaimana yang terdapat dalam kisah Bibel. Hingga masa perang sipil, ia menuturkan,

*The American civil religion focused above all on the event of Revolution, which seen as the final act of the Exodus from the old lands across the waters. The Declaration of Independence and Constitution were sacred scriptures and Washington the divinely appointed Moses who led the people out of hands of tyranny.*³⁸

Meskipun masih menganggap kasus Amerika sebagai contoh paling gamblang dari agama sipil, Bellah bersama Philip E. Hammod, juga melakukan survei terhadap beberapa negara dan menemukan adanya indikasi yang bisa disebut sebagai agama sipil yaitu perpaduan antara idealisme kebangsaan dan semangat keagamaan. Di Jepang kesetiaan kepada kaisar dan negara merupakan semangat religius,³⁹ di Meksiko,⁴⁰ meskipun tidak sejelas seperti kasus Amerika, namun juga ada nilai-nilai heroisme kebangsaan yang muatannya religius sedangkan di Italia Bellah mencatat adanya ideologi-ideologi politik liberalisme, sosialisme, fasisme yang dapat disejajarkan dengan Katolikisme dalam efektivitasnya dalam mengarahkan perilaku rakyat.⁴¹

Agama sipil, pada akhirnya, akan berfungsi sebagai payung yang menyatukan berbagai faksi ideologis, sebagai *common ground* dari gerak masyarakat sekaligus *point of reference* untuk menyelesaikan konflik. Agama sipil merupakan alternatif untuk membangun masyarakat

38 *Ibid*, hlm. 175.

39 Robert N. Bellah & Philip E. Hammond, *Varieties of Civil Religion*, San Fransisco: Harper & Row, 1980, hlm. 27-39.

40 *Ibid*, hlm. 40-85.

41 *Ibid*, hlm. 86-117.

yang demokratis. Terbentuknya agama sipil dapat diusahakan dengan, meminjam kalimat Hammond,

It is here that the law must be turned to, especially to the degree that it is universalistic, thus overriding whatever parochial conditions have stood in the way... And if the agencies of this legal order use the language and imagery of purpose and destiny, if they not only resolve differences but also justify their resolution, it is easy to see how something identifiable as civil religion could emerge. There would exist already a cadre of "clergy," a set of "rituals" places for "worship," and a number of directives for behavior. Add to these a "theology" – and ideology of purpose and destiny or theodicy – and a civil religion may close behind.⁴²

Analisis dan Perbandingan

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa, meskipun menggunakan frase yang sama *civil religion* ternyata Rousseau dan Bellah menempuh jalan argumentasi yang berbeda dan sampai kepada kesimpulan yang juga tidak sama mengenai apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Secara berurutan akan diuraikan perbandingan kedua pemikir ini.

1. Rousseau, sebagai seorang filsuf, menyusun konsepnya berdasarkan penalaran deduktif abstrak. Dalam membicarakan tentang *civil society* maupun *civil religion* ia sama sekali tidak merujuk kepada kasus konkret apa pun. Sehingga tampak bahwa argumennya begitu rumit, karena ia berusaha untuk mengurangi sebisa mungkin celah yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dari argumen-argumen yang disampaikannya. Beberapa rujukan historis memang ia lakukan, namun itu sekedar berfungsi sebagai contoh, dan bukan landasan argumennya. Pendekatan filosofis semacam ini memiliki resiko untuk mereduksi fakta agar mendukung argumen yang telah dikemukakan dan Rousseau pernah melakukannya ketika berbicara tentang sains dan seni sebagai penyebab kemerosotan kehidupan manusia.

Sementara Bellah, sebagai sosiolog, mendasarkan teorinya pada kasus-kasus konkret yang ada dalam sejarah masyarakat. Membaca uraian Bellah, kita akan disuguh berbagai data, fakta, dan peristiwa yang kemudian dirangkai membentuk argumen tentang agama sipil. Pendekatan ini membuat kajian Bellah lebih konkret bila dibanding dengan Rousseau, karena berpijakan kepada

⁴² Bellah and Hammond, *Varieties of Civil Religion*, hlm. 136.

kasus yang terjadi secara historis. Namun rangkaian kasus dan fakta yang ditampilkan terkadang mengubur kalimat-kalimat penting yang menjadi poin dari argumennya, sehingga sulit ditemukan kalimat penyimpulnya.

2. Perbedaan pendekatan ini, akibatnya, juga mengimplikasikan perbedaan asumsi dasar yang digunakan. Rousseau, sebagai pelanjut Thomas Hobbes dan John Locke berpijak pada asumsi mengenai *natural law* yang mendasari seluruh proses di alam semesta termasuk proses psikologis dan proses sosial.⁴³ Asumsi ini telah membawa Rousseau untuk menganggap usaha pembentukan *civil society* maupun *civil religion* sekedar *discovery* dari hakikat manusia dan masyarakat, dan bukan *social engeneering* yang bersifat *invention*.

Sedangkan Bellah, sebagai pewaris perguruan Parsonian dan tradisi evolusionis, berpijak pada asumsi rasionalisme, yang menganggap manusia memiliki potensi rasional untuk selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Asumsi tersebut kemudian mendorong Bellah untuk selalu mencari argumen positif terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam kehidupan keagamaan. Bellah tampaknya juga mengikuti teori fungsionalisme Durkheim, yang mengasumsikan bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam sistem sosial selalu memiliki fungsi untuk menciptakan keseimbangan bagi keseluruhan sistem tersebut.⁴⁴

3. Dalam pandangan Rousseau, inti dari agama adalah doktrin-doktrin metafisik yang dapat mengarahkan perbuatan manusia ke arah yang lebih baik dengan demikian agama sipil juga harus dibangun berdasarkan dogma-dogma yang masih mengarah kepada transendensi, yang tetap mengikat tetapi tidak doktriner dogma agama sipil yang mencakup konsep tentang Tuhan, akhirat, dan pembalasan.

Sedangkan dalam pandangan Bellah, berdasarkan bukti-bukti yang ia temukan, fokus keberagamaan masyarakat modern adalah kualitas moral, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan bukan lagi kepada keterikatan

43 John Cottingham (ed.) *Western Philosophy, An Anthology*, Oxford: Blackwell, 1996, hlm. 486.

44 Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory*, London: Sage Publication, 1994, hlm. 133-35.

terhadap ide-ide metafisik spekulatif. Oleh karena itu agama sipil tidak mengharuskan perumusan doktrin tentang Tuhan, melainkan lebih pada kode-kode etik yang mengikat secara legal.⁴⁵

Penutup

Konsep tentang agama sipil yang ditawarkan oleh J. J. Rousseau dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Bellah merupakan sebuah terobosan baru untuk membangun mekanisme hubungan yang lebih baik antara agama dan politik. Upaya tersebut sangat perlu dilakukan, terutama dalam situasi kehidupan dewasa ini yang demikian plural, di mana agama dan politik bukan hanya saling menjaga untuk menghadirkan kedamaian namun juga saling memprovokasi untuk menghasilkan kekacauan. Agama dan politik harus diletakkan dalam posisi yang sejajar, dan tidak terlalu jauh agar dapat saling bekerja sama, namun juga tidak telalu dekat sehingga tidak saling mengkooptasi.

Namun demikian, pemikiran kedua tokoh di atas juga tidak lepas dari kritik. Konsep kontrak sosial Rousseau misalnya, dicap sebagai *philosophical fiction* oleh David Hume,⁴⁶ karena didasarkan pada asumsi “mausia dilahirkan dalam kondisi bebas.” Ungkapan ini bukan sebuah argumen, karena tidak deskriptif bebas dari apa, atau bebas untuk apa? Ungkapan tersebut lebih bersifat preskriptif mengungkapkan kehendak atau cita-cita, dengan demikian tidak bisa disebut benar atau salah. Orang boleh bercita-cita apa saja, tanpa ada yang bisa menyalahkan.⁴⁷ Konsepnya tentang agama sipil pun juga dikritik, karena tampak bertentangan dengan beberapa argumennya yang lain.⁴⁸

Sedangkan pandangan Bellah yang optimistis dalam menyikapi modernisasi juga mendapat kritik yang cukup tajam. Menurut para pengkritiknya ini, Bellah cenderung mengabaikan efek negatif dari modernisasi, yaitu terkikisnya tradisi, dan hilangnya sistem nilai yang

45 Cukup menarik bahwa kesimpulan Bellah tentang tren keberagamaan yang non-deis ini memndapatkan afirmasi positif ketika berlangsungnya peringatan 100 tahun Konferensi Agama-Agama Duni di Chicago, panitia yang diketuai Hans Kung ternyata hanya berhasil menyusun kesepakatan pada tingkat moral, dan gagal pada tingkat teologis karena delegasi Budhis tidak menerima pernyataan “In the name of God.”. Lihat Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, *Etik Global*, terj. Ahmad Murtajib, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 77-85.

46 Lihat F. Copleston, *A History of Philosophy*, vol. VI, hlm. 83.

47 John R. Burr & Milton Goldinger, *Philosophy and Contemporary Issues*, New Jersey: Simon Chuster, 1996, hlm. 290.

48 Lihat F. Copleston, *A History of Philosophy*, vol. VI., hlm. 89.

mengakibatkan terjadinya disorientasi sosial.⁴⁹ Konsep agama sipil Bellah yang mengamalgamasi muatan religiusitas ke dalam sistem legal-politis juga dianggap dapat memicu sikap pemujaan terhadap Negara meskipun sebenarnya ia bermaksud sebaliknya.⁵⁰

Terlepas dari berbagai kritik dan kelemahan yang tentu selalu ada dalam usaha manusia, pemikiran kedua tokoh di atas diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang yang memiliki minat dan perhatian terhadap hubungan antara agama dan politik. Seperti yang ditekankan oleh Bellah sendiri, proses modernisasi, sebagai suatu bentuk perubahan sosial, adalah persoalan abadi dalam kehidupan manusia, yang tidak akan pernah diketemukan jawaban akhirnya secara tuntas.⁵¹ Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba memperbaiki, dan berusaha untuk selalu lebih baik lagi.

Daftar Bacaan

Bellah, Robert N., *Beyond Belief, Essays on Religion in a Post-Traditional Society*, New York: Harper & Row, 1970, hlm. xi-xxi.

_____, *Religi Tokugawa*, terj. Wardah Hafiz, Jakarta: Gramedia, 1992.

_____, & Philip E. Hammond, *Varieties of Civil Religion*, San Frnsisco: Harper & Row, 1980.

Burr, John R. & Milton Goldinger, *Philosophy and Contemporary Issues*, New Jersey: Simon Chuster, 1996.

Capps, Walter H., *Religious Studies, the Making of A Discipline*, Minneapolis: Fortres Publishing, 1996.

Coleman, John A., "Civil Religion," dalam *Sociological Analysis*, 31 (Summer, 1970).

Copleston, Frederick S.J., *A History of Philosophy*, London: Search Press, 1960, vo. VI.

Cottingham, John (ed.) *Western Philosophy, An Anthology*, Oxford: Blackwell, 1996.

Eliade, Mircea, *The Sacred and the Profan*, New York: Harcourt, 1957.

49 Lihat catatan kaki no. 24.

50 Lihat catatan Bellah, *Beyond Belief*, hlm., 168.

51 "Finally let me say that 'success' in modernization is always relative and transient because modernization itself is so endlessly subversive of every fixed position, no matter how great it may have been originally. There are no ground for complecency that any society has in any final sense 'solved' the problems of meaning and modernization." Bellah "Meaning and Modernization," dalam *Beyond Belief*, hlm. 73.

_____, *Pattern in Comparative Religion*, New York: Meridian Books, 1958, hlm. 548 dst.

Green, Renald M., "Morality and Religion," (ed.) Mircea Eliade, *Encyclopedia of Religion*, vol. 10.

Hoogvelt, Ankie M. M., *The Sociology of Developing Societies*, London: Macmillan, 1976.

Kung, Hans dan Karl-Josef Kuschel, *Etik Global*, terj. Ahmad Murtajib, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Laslett, Peter, "Social Contract," dalam *Encyclopedia of Philosophy*, (ed.) Paul Edwards, New York: Macmillan, 1967.

McBride, William Leon, "Rousseau, Jean Jacques," dalam (ed.) Mircea Eliade, *Encyclopedia of Religion*, vol. 12, hlm. 477-479.

Nisbet, Robert, "Civil Religion", (ed.) Mircea Eliade, *Encyclopedia of Religion*, vol. 4, hlm. 517-519.

Pals, Daniel L., *Seven Theories of Religion*, Oxford: Oxford University Press, 1996.

Rousseau, Jean Jacques, *Social Contract*, Trans. G.D.H. Cole, London: Dent, 1955.

Scrutan, Roger, *A Dictionary of Political Thought*, London: Macmillan, 1982.

Sharpe, Eric J., *Comparative Religion, A History*, London: Duckworth, 1977.

Smith, Patrick H. Nowell, "Morality and Religion," dalam *Encyclopedia of Philosophy*, (ed.) Paul Edwards, New York: Macmillan, 1967.

Smith, Wilfred Cantwell, *The Meaning and End of Religion*, New York: Mentor Books, 1964.

Stackhouse, Max L., "Politic and Religion," dalam *Encyclopedia of Religion*, Mircea Eliade (ed.), New York: University of Chicago Press, 1996.

Waller, James & Mary Edwardsen, "Evolutionis," dalam *Encyclopedia of Religion*, (ed.) Mircea Eliade, New York: University of Chicago Press, 1996.

Waters, Malcolm, *Modern Sociological Theory*, London: Sage Publication, 1994, hlm. 133-35.

Wogeman, J. Paul, *Christian Perspective on Politics*, Westminister: John Knox Press, 2000.